RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Gubernur Sumatera Selatan

"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. RENJA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2030 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD urusan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Air.

Penyusunan RENJA memiliki tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel yang memuat strategi pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efektifitas sumber daya dan efisiensi alokasi sumber dana dalam pembangunan daerah di bidang urusan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Palembang, 16 Januari 2026
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Sumatera Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
BAB. I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 9
1.3. Maksud dan Tujuan 11
1.4. Sistematika Penulisan 11
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13
2.1. Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target 13
2.1.1.. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13
2.1.2.. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 19
2.4. Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.4.1.. Jenis Pelayanan 22
2.4.2.. Kelompok sasaran layanan 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 26
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN ANGGARAN 2021 30
DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006) 31
BAB. V PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rensta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 - Tahun Anggaran 2026 16

Tabel 2. 2 Tabel Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Diagram Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumsel..... 20
Gambar 2. 2 Diagram Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Sumsel..... 20

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian dari Rencana Strategis dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan untuk rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembangunan prasarana dan sarana dasar, perlu menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman penyusunan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta acuan bagi penyusunan program tahunan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2030. Pembangunan prasarana dan sarana dasar pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata sebagaimana yang tertuang dalam agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2030.

Sebagaimana visi Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan, **"Sumsel Maju Untuk Semua"** dan misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian,industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana kerja dengan menetapkan program dan kegiatan tahunan dan dalam rangka mewujudkan visi dan agenda tersebut.

Wilayah Sumatera Selatan mempunyai cakupan wilayah yang cukup besar atau sekitar 91.592,43 Km^2 dengan jumlah penduduk $\pm$ 8,4 juta jiwa dengan pembagian wilayah administrasi terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Sumatera Selatan memiliki potensi energi serta hasil bumi yang cukup besar, harus memiliki sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah serta sustainable yang ramah lingkungan, dengan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan yang ada harus mampu mengeksplore potensi yang ada. Sesuai dengan arahan dan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Selatan 2025 – 2030 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2030 tahap keempatbahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan diatas angka 6,5 persen/tahun. Untuk mendukung penguatan struktur ekonomi serta pertumbuhan ekonomi diatas, maka sektor infrastruktur transportasi memegang peranan strategis.

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi daerah Provinsi

Sumatera Selatan tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan luas wilayah sebesar 87.421,24 km2. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan posisi geografisnya terdiri dari :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi,

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung

Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Sebelah timur : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung

Untuk itu peranan, tantangan dan fungsi SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan bahwa SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom provinsi di sektor Ketahanan Pangan dan Pengendalian Bencana.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, arah dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mendukung RPJMD tahap kedua periodisasi 2025 – 2030. Rencana Strategis (Renstra) SKPD diharapkan mengarah pada perbaikan sistem transportasi dengan pendekatan pembangunan infrastruktur perhubungan yang strategis berbasis spasial dengan potensi kewilayahan.

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renja SKPD :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Pembentukan Tim penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD. Susunan keanggotaan Tim

berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTD yang ada. Tugas tim penyusun Renja SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renja SKPD.

b. Orientasi Mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renja SKPD, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renja SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Renja SKPD bidang perhubungandilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahunan pelaksanaan Renja periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan kewilayahan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan denganlangkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renja SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perhubungan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
   a. RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, dan Renja K/L;
   b. RPJMD Kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota;
   c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu;
4. Data statistik perhubungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1991 Tentang Rawa;
5. Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 77 Tahun 1991 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden RI No 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA-OPD;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5/PRT/M/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no. 4 tahun 2015 Tentang kriteria dan Penetapan Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no.6 tahun 2015, Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no.8 tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no.9 tahun 2015 Tentang penggunaan Sumber Daya Air;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.11 tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan Reklamasi Rawa Pasut;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no.14 tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no.16 tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 17 tahun 2015 Tentang Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 tahun 2015 Tentang Pengalihan alur Sungai dan atau pemanfaatan ruas bekas sungai;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 tahun 2015 Tentang Bendungan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.29 tahun 2015 Tentang Rawa;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.30 tahun 2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.28 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD pada tahun berjalan;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra SKPD periode waktu 2025 – 2030;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam Renstra periode waktu 2025 – 2030;

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan atau transportasi;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan tahun ke – 3 dari Rencana Strategis (Renstra SKPD) periode 2025 – 2030. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran, program/kegiatan di dalam dokumen Renstra SKPD serta mendukung RPJMD tersaji dalam realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pengelolan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan

Pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan mendapat APBD sebesar Rp. 119.517.446.140,- yang terdiri dari :

- Belanja Operasi : Rp. 62.885.946.140,-
- Belanja Modal : Rp. 56.631.500.000,-

Anggaran Belanja Operasi pada lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 2 Program dan 9 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 119.517.446.140,- dengan program/ kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Alat Besar
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

A. Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
2. Normalisasi / Restorasi Sungai
3. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
4. Operasional dan Pemeliharaan Polder / Kolam Retensi
5. Peningkatan Polder/Kolam Retensi

6. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
7. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
8. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
9. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai
10. Pemeliharaan Sungai
11. Rehabilitasi Embung
12. Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

B. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
5. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
6. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rensta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 - Tahun Anggaran 2026

NOMOR	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target SPM/IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra PD Tahun Ke-				
				TAHUN 1 (2020)	TAHUN 2 (2021)	TAHUN 3 (2022)	TAHUN 4 (2023)	TAHUN 5 (2024)	TAHUN 1 (2020)	TAHUN 2 (2021)	TAHUN 3 (2022)	TAHUN 4 (2023)	TAHUN 5 (2024)	TAHUN 1 (2020)	TAHUN 2 (2021)	TAHUN 3 (2022)	TAHUN 4 (2023)	TAHUN 5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	**32.855**	**Ha**	30.595	29.819	31.355	32.855	39.824	29.214	30.398	32.899	34.294	37.092	0,95	1,02	1,05	1,04	0,93
2.	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	**13.000**	**Ha**	8.700	7.768	10.500	13.000	16.998	3.902	11.714	11.714	13.289	13.957	7,88	23,66	23,66	1,02	0,82
3.	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	**5.200**	**Ha**	4.209	5.000	5.100	5.200	-	3.989	5.153	5.153	5.447	-	4,38	5,66	5,66	5,98	104,75
4.	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	**11.000**	**Ha**	2.200	8.995	9.500	11.000	11.125	6.655	8.995	9.500	11.000	11.033	60,50	81,77	86,36	100,00	100.00
5.	Volume Ketersediaan Air Baku	**65.000**	**M^3**	25.000	45.000	55.000	65.000	585.400	35.700	35.700	311.500	553.715	640.044	54,92	54,92	479,23	851,87	100.00
6.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	**100**	**%**	40,74	58,21	79,11	100	87,82	47,89	71,74	78,26	100	100	1,17	1,23	0,98	1	1,14
7.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	**56,07**	**%**	47,78	46,77	51,57	56,07	59.74	40,75	51,91	54,66	58,24	56.07	0,85	1,11	1,06	1,04	0,93

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sistem Pengelolaan Sumber daya Air yang berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung sektor Pertanian dan sektor pengendalian bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan Sumber Daya Air pada sektor pertanian berupa pengelolaan Jaringan Irigasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pada sektor pertanian atau ketahanan pangan, Sehingga dengan adanya jaringan irigasi yang terairi yang berkelanjutan [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana.

Pertumbuhan pembangunan sektor Pertanian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari Provinsi Sumatera Selatan merupakan Lumbung pangan Nasional nomor 5 di Indonesia. Capaian Kondisi Daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan hingga akhir Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

(berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2015)

NO	NAMA DI/DIR	NILAI BOBOT		Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	TOTAL BOBOT	INDEKS KONDISI SARANA FISIK (SKALA 100)	KONDISI	KINERJA	TAHUN	KET
		SISTEM IRIGASI UTAMA	SISTEM IRIGASI TERSIER								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DI.AIR MERAH	-	-	1500		-	-	-	-	-	Belum dilakukan Epaksi terbaru
2	DI. MASAM BALAU	-	-	1500	228,95	-	-	-	-	-	Belum dilakukan Epaksi terbaru
3	DI LEBAK DATUK	-	-			-	-	-	-	-	Overlapping dengan DIR Lebak Datuk
4	DI LEBAK SEMENDAWAI	-	-			-	-	-	-	-	Overlapping dengan DIR Lebak Semendawai
5	DI LECAH PAYE	4,46	1,29	1295	534,08	5,75	12,78	RUSAK TOTAL	JELEK	2025	masuk dalam inpres
6	DI. DANAU TAMPANG	6,36	-	2690		6,36	14,13	RUSAK TOTAL	JELEK	2025	proses kelengkapan ADM
7	DI. AIR MULAK	6,49	2,54	1645	525,59	9,03	20,07	RUSAK BERAT	JELEK	2025	updating desain paska bencana (DED Bendung)
8	DI. AIR SATAN	6,61	4,25	1175	342,70	10,86	24,13	RUSAK BERAT	JELEK	2025	dikerjakan tahun 2025, menunggu updating epaksi 2026
9	DI. MERENDANG	8,59	2,75	1341	291,11	11,34	25,20	RUSAK BERAT	JELEK	2025	dikerjakan pemkab lahat 2027
10	DI.TUNGGUL BUTE	10,35	1,11	2400	114,68	11,46	25,47	RUSAK BERAT	JELEK	2025	proses kelengkapan ADM
11	DI. ATARAN SUNGAI AIR DERAS	9,06	3,59	1000		12,65	28,11	RUSAK BERAT	JELEK	2025	dikerjakan tahun 2026
12	DI. AIR KEBAN	10,23	3,74	1500	320,88	13,97	31,04	RUSAK BERAT	JELEK	2025	dikerjakan tahun 2026
13	DI. AIR GOHONG	10,23	4,22	1200	267,75	13,98	31,07	RUSAK BERAT	JELEK	2024	inpres
14	DI. AIR MAKIM	9,61	4,69	1000	184,81	14,30	31,78	RUSAK BERAT	JELEK	2025	inpres
15	DI SELANGIS KECIL	9,81	4,52	1352	540,91	14,33	31,84	RUSAK BERAT	JELEK	2025	proses kelengkapan ADM
16	DI. AIR MANNA I	10,21	4,26	1500	294,82	14,47	32,16	RUSAK BERAT	JELEK	2024	inpres
17	DI. AIR GEGAS	14,14	1,20	2300		15,34	34,09	RUSAK BERAT	JELEK	2025	proses kelengkapan ADM
18	DI. PASEMAH	13,79	1,63	1107	169,11	15,42	34,27	RUSAK BERAT	JELEK	2025	fungsional kecil
19	DI SELANGIS BESAR/JEMAI	9,99	5,89	1020	57,48	15,88	35,29	RUSAK BERAT	JELEK	2025	fungsional kecil
20	DI. TEBING PANJANG	14,60	2,17	1256	435,09	16,77	37,27	RUSAK BERAT	JELEK	2025	dikerjakan 2025
21	DI. AIR PANGI	12,54	4,90	1001	345,10	17,44	38,76	RUSAK BERAT	JELEK	2023	dikerjakan lahat
22	DI. ENDIKAT BENGKOK	15,30	2,88	1500	729,53	18,18	40,40	RUSAK BERAT	JELEK	2025	inpres
23	DI. AIR SUNGKAI	16,70	2,56	1500	196,41	19,26	42,80	RUSAK BERAT	JELEK	2022	
24	DI. AIR SUNUR	17,49	3,27	1701	176,21	20,76	46,13	RUSAK BERAT	JELEK	2022	fungsional kecil
25	DI. MEGANG TIKIP	18,79	2,83	1077	272,00	21,62	48,04	RUSAK BERAT	JELEK	2025	dikerjakan tahun 2026
26	DI. AIR PIUS	16,35	5,52	1600	240,04	21,87	48,60	RUSAK BERAT	JELEK	2023	dikerjakan tahun 2026
27	DI. AIR DERAS I	20,88	2,74	1461	423,93	23,62	52,49	RUSAK BERAT	JELEK	2023	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Secara umum Sumatera Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi anatar 24,7 derajat celcius dimana ditemui daerah berhawa panas, sedang dan dingin. Berdasarkan topografi daerah Sumatera Selatan dapat dibagi menjadi daerah yang mempunyai ketinggian antara 400 – 500 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan luas 37%, ketinggian 500 – 1000 meter dengan luas 34% dan ketinggian 1000 – 1.700 meter dengan luas 29% dari keseluruhan wilayah.

Disamping itu daerah Sumatera Selatan mempunyai sumber-sumber air yang melimpah dengan 9 (sembilan) sungai besar yang dikenal dengan sebutan Batanghari Sembilan, yaitu: S.Musi, S.Rawas, S.Lematang, S.Kelingi, S.Komering, S.Ogan, S.Lakitan, S. Semangus dan S.Batanghari Leko. Bersama-sama dengan sungai-sungai kecil lainnya keseluruhan sungai tersebut merupakan potensi sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan pengairan, industri, listrik dan lain-lain.

Potensi sumber daya air permukaan yang berasal dari 9 (sembilan) sungai besar dan kecil dibagi dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Musi, SWS Sugihan dan SWS Banyuasin dengan luas lebih kurang 94.028 KM^2 dan kapasitas 103.589 x 10^6 M^3. Potensi tersebut baru dimanfaatkan 4,11% atau 4.966 x 10^6 M^3 untuk kebutuhan pertanian, air minum, industri, penggelontoran, perikanan dan peternakan, sementara sisanya 115.684 x 10^6 M^3 atau 98,59% belum dimanfaatkan.

Tabel Potensi lahan irigasi dan rawa yang dapat dan telah dikembangkan menjadi persawahan atau pertanian seluas 976.133 Ha (Gambar 2.1 dan Gambar 2.2), yang terdiri dari :

a. Daerah Irigasi Permukaan seluas : 41.541 Ha
- Daerah Irigasi yang berfungsi : 10.751 Ha
- Daerah Irigasi Potensial : 28.287 Ha
- Daerah Irigasi Alih Fungsi : 3.207 Ha
  - Daerah Irigasi menjadi Permukiman : 1.812 Ha

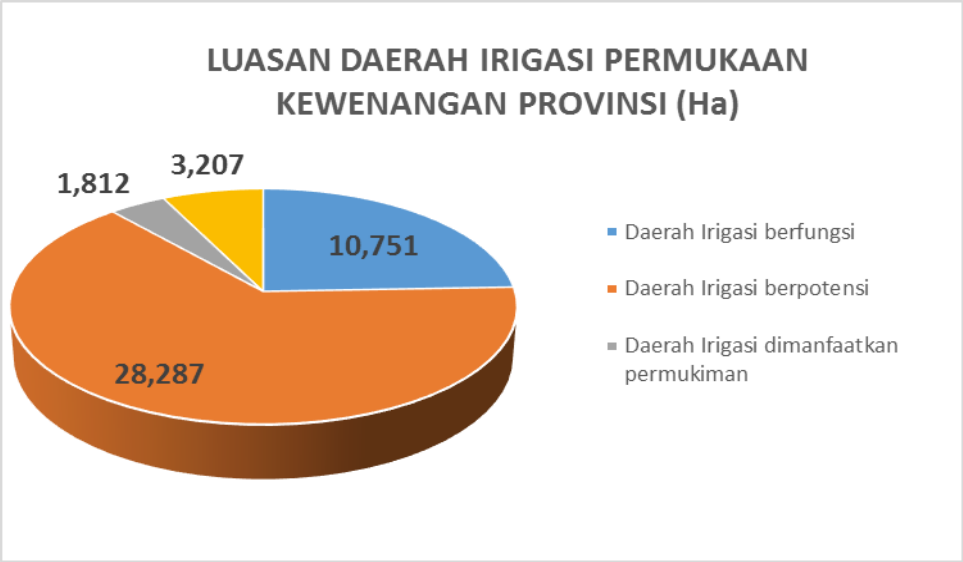

Gambar 2. 1 Diagram Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumsel

b. Daerah Irigasi Rawa seluas : 49.509 Ha

- Daerah Irigasi Rawa Potensial : 42.679 Ha
  - Daerah Irigasi Rawa Berfungsi : 7.064 Ha

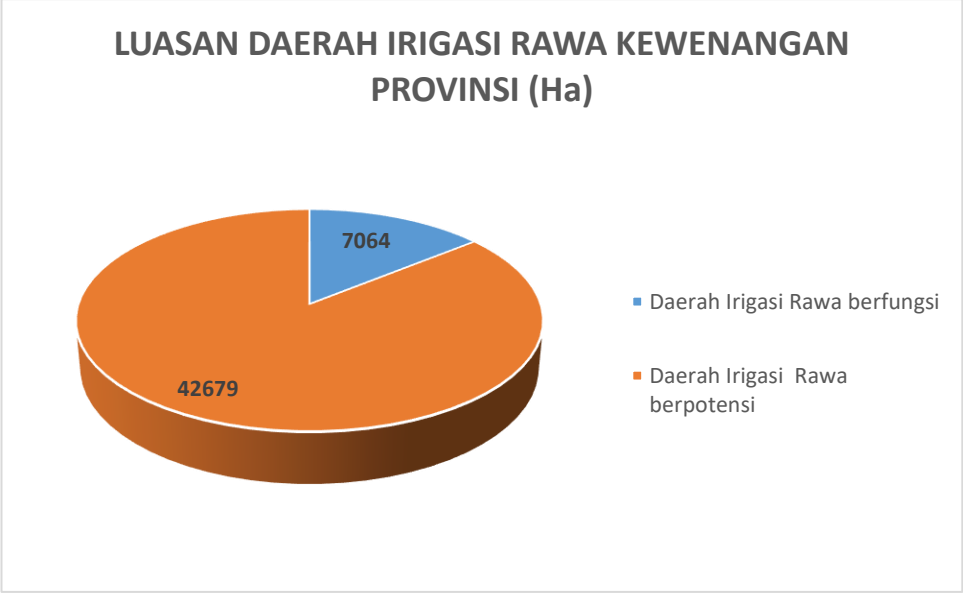

Gambar 2. 2 Diagram Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Sumsel

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat didefinikasikan beberapa isu permalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut :

- Kerusakan Infrastruktur Jaringan Irigasi Permukaan penunjang pertanian terus meningkat
- Bertambahnya Alih fungsi lahan sawah ke non sawah
- Ketersediaan air baku yang menurun (dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
- Banjir, longsor/erosi dan sedimentasi
- Terjadinya perubahan iklim global yang ekstrim
- Maraknya pembakaran hutan di daerah rawa gambut
- Masih besarnya potensi lahan sub optimal yang ada di Sumatera Selatan yang belum tersentuh/dikembangkan terutama pada Daerah Irigasi Rawa.

2.4. Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berpedoman pada Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu: **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"** berdasarkan mandat tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum di Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomormor 44 Tahun 2016 dan Nomormor 28 Tahun 2018 serta keterkaitan dengan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 5 Tahun, maka misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasai perubahan iklim;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;

Untuk mewujudkan misi tersebut maka dibutukan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
2. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana

3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

2.4.1 Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Pengembangan Daerah Jaringan Irigasi

   Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan dan perternakan.

2. Pengembangan Daerah Jaringan Rawa

   Mengembangkan daerah jaringan rawa agar dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta diversifikasi sektor usaha lainnya.

3. Pemeliharaan Sungai

   Pemeliharaan di daerah-daerah sekitar sungai dan daerah-daerah di sepanjang sungai terutama dataran rendah dan daerah hilir sungai termasuk lahan persawahan maupun lahan pemukiman penduduk.

4. Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi

   Memperbaiki jaringan daerah irigasi untuk dapat berfungsi baik serta mendukung sektor pertanian, perkebunan dan perternakan.

5. Perkuatan Lembaga (kelembagaan)

   Meningkatkan perkuatan kelembagaan yang terkait dan sumber daya air.

6. Kapasitas Air Baku

   Meningkatnya ketersediaan kapasitas sarana air baku untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota (cross cutting)

2.4.2 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Masyarakat yang melakukan pengolahan persawahan (pertanian);
2. Masyarakat pertanian, perkebunan dan perternakan;
3. Melindungi sungai serta lahan pertanian, perkebunan, perternakan dan pemukiman penduduk di sekitar daerah aliran sungai dari kerusakan akibat banjir;
4. Perbaikan jaringan daerah irigasi yang rusak dan mengoptimalisasikan daerah jaringan irigasi tersebut;
5. Peningkatan kualitas masyarakat pertanian yang melakukan pengelolaan irigasi untuk kegiatan pengolahan sawah serta perkuatan kualitas sumber daya manusia untuk para aparatur pelaksana kegiatan pengelolaan irigasi dan rawa.

Sasaran dan Indikator Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Terwujudnya pembangunan irigasi permukaan baru, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan luas irigasi permukaan baru yang terbangun;
2. Terwujudnya pembangunan irigasi rawa baru, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan luas irigasi rawa baru yang terbangun;
3. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi permukaan, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan jumlah persentase indeks kinerja jaringan irigasi permukaan;
4. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi rawa, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan jumlah persentase indeks kinerja jaringan irigasi rawa;
5. Terciptanya modernisasi irigasi, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase ketersediaan sistema informasi tekNomorlogi/ data base jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa;
6. Terciptanya Pengelolaan irigasi secara partisipatif, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase pelaksanaan program irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dilakukan secara partisipatif;

7. Terlaksananya target pemenuhan kebutuhan air baku, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase infrastruktur air baku yang tersedia;
8. Mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase kawasan bebas banjir;
9. Terjaganya stabilitas tebing sungai, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase bataran sungai yang terlindungi.

Indikator sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi;
2. Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi;
3. Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi;
4. Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor;
5. Volume Ketersediaan Air Baku;
6. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir;
7. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme Usulan kegiatan masyarakat dapat ditampung melalui aplikasi e-sumsel, Aspirasi Anggota Dewan dan usulan dari Kabupaten kota melalui perangkat daerah terkait yang dibawa pada saat Rapat Teknis, Musrenbang Provinsi, semua usulan yang masuk diverifikasi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Verifikasi ini disesuaikan dengan kondisi lapangan yang diusulkan serta rediness criteria yang ada serta kesesuaian dengan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi sebagaimana tercantum pada Undang- undang nomor 23 tahun 2014 dan PERMEN PUPR Nomor 14 tahun 2015. Untuk daerah irigasi kewenangan provinsi memiliki luas 91.050 Ha yang terdiri dari daerah irigasi permukaan seluas 41.541 Ha yang tersebar di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur dan Kota Pagaralam, sedangkan untuk Daerah Irigasi Rawa seluas

49.509 Ha yang tersebar di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Illir, dan Kabupaten OKU Timur.

Dalam usulan untuk penanggulangan bencana banjir sungai dan longsor tebing sungai kita verifikasi sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan PERMEN PUPR Nomor 4 Tahun 2015. Hasil usulan yang telah di verifikasi akan masuk ke Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, setelah disetujui oleh Tim TAPD sampai menjadi DIPA.

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional pada RPJMN 2025 – 2029 " Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2025 – 2029 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pengelolaah Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan mendukung kebijakan nasional pada Agenda 1 (satu)

"Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas" dan Agenda 6 (enam) "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim"

Sasaran dalam Agenda **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas** berupa Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Arah Kebijakan dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas untuk Sektor Sumber Daya Air dapat mendukung Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi

1. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
3. meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar;
4. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, digitalisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air irigasi;
5. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Sasaran dalam Agenda "**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim "** Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian,

dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok Arah kebijakan, berupa:

(1) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
(2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
(3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon

Perangkat Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan mendukung Arah kebijakan Nasional dalam **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**.

Isu permasalahan di Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya (>95 persen) merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya, antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrim. Oleh karena itu, agenda konvergensi antara adaptasi perubahan iklim (API) dengan pengurangan risiko bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam perundingan dan kerjasama internasional.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, serta (f) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di

Pesisir dan Laut; (b) Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis.

3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Reforestasi Kawasan Hutan; (c) Restorasi Lahan Bekas Tambang; (d) Pemulihan Kualitas Air Sungai Dan Danau; (e) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (f) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (g) Peningkatan populasi spesies terancam punah di habitat exsitu.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Berikut ini Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Sebagaimana tertuang dalam dokumen IKU dan perjanjian kinerja tahun 2026 :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air serta penanggulangan sumber daya yang berkelanjutan	1.1. Kapasitas Air Baku	m^3/detik	2,46
		1.2. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,65
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai SAKIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai	82,38

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan - kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung program - program agenda Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2030 dan mendukung visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **"Sumsel Maju Untuk Semua"**. Agar program/ kegiatan dapat terlihat lebih terinci diampilkan dalam tabel yang terlampir Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) :

DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006)

Nomor	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*
	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					**119.517.446.140**		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**1**	**%**	**45.106.578.570**		
A	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**1**	**%**	**902.000.000**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palembang	1	Dokumen	267.000.000		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palembang	1	Dokumen	35.000.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sumsel	1	Laporan	600.000.000		
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**1**	**%**	**22.681.178.570**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palembang	2814	Orang/Bulan	20.952.018.170		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palembang	3	Dokumen	1.694.160.400		
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Palembang	1	Dokumen	35.000.000		
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**1**	**%**	**1.101.000.000**		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palembang	1	Paket	301.000.000		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Palembang	17	Orang	600.000.000		
3	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palembang	30	Orang	200.000.000		
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1**	**%**	**3.034.000.000**		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	4	Paket	50.000.000		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	1	Paket	200.000.000		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	1	Paket	750.000.000		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palembang	1	Paket	150.000.000		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palembang	1	Dokumen	10.000.000		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palembang	1	Laporan	150.000.000		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palembang	1	Laporan	700.000.000		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	1.024.000.000		

E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang OPD**		**1**	**%**	**12.600.000.000**		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palembang	1	Unit	600.000.000		
2	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Palembang	1	Unit	2.800.000.000		
3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palembang	1	Paket	200.000.000		
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palembang	1	Unit	2.500.000.000		
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palembang	1	Unit	6.000.000.000		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palembang	7	Unit	500.000.000		
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1**	**%**	**1.958.400.000**		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palembang	14	Laporan	1.070.000.000		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	3	Laporan	888.400.000		
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**1**	**%**	**2.830.000.000**		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palembang	22	Unit	750.000.000		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Palembang	4	Unit	280.000.000		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palembang	1	Unit	100.000.000		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palembang	1	Unit	1.200.000.000		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palembang	1	Unit	500.000.000		
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Terlaksana**		**2**	**%**	**74.410.867.570**		
A	**PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Insfrastruktur Pengendalian Banjir dan**		**95,91**	**%**	**24.478.767.570**		
1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi**		**1**	**Lembaga**	**250.000.000**		
2	**Normalisasi / Restorasi Sungai**	**Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi**		**8**	**Km**	**5.738.500.000**		
	Alat Tulis Kantor					*3.500.000*		
	Perjalanan Dinas Biasa					*75.000.000*		
	- Normalisasi Sungai di Kec. Belitang Jaya		Kab. OKU Timur	2	Km	3.000.000.000		
	- Normalisasi Sungai Tromo Desa Pangkalan Glebak, Kec. Rambutan		Kab. Banyuasin	3	Km	1.000.000.000		
	- Normalisasi Sungai di Desa Kotaway, Kec. Buay Pemaca		Kab. OKU Selatan	3	Km	1.500.000.000		
	- Supervisi Kegiatan Sungai		Prov. Sumsel	1	Dokumen	160.000.000		

3	**Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi**			**0**	**Dokumen**	**100.000.000**
4	**Operasional dan Pemeliharaan Polder / Kolam Retensi**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara**		**2**	**Unit**	**670.000.000**
	Alat Tulis Kantor					*25.000.000*
	Belanja Bahan-bahan Lainnya					*30.000.000*
	Jasa Petugas					*600.000.000*
	Pakaian Dinas Lapangan					*15.000.000*
5	**Peningkatan Polder/Kolam Retensi**			**1**	**Unit**	**2.106.500.000**
	Alat Tulis Kantor					*1.500.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*5.000.000*
	- Peningkatan Kolam Retensi Arafuru		Kota Palembang	1	Unit	2.000.000.000
	- Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kolam Retensi Arafuru		Kota Palembang	1	Dokumen	100.000.000
6	**Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku**	**Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun**		**6**	**Titik**	**1.710.500.000**
	Alat Tulis Kantor					*2.500.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*51.000.000*
	- Pembangunan Sumur Bor di Desa Remayu, Kec. Tuah Negeri		Kab. Musi Rawas	2	Titik	500.000.000
	- Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di Desa Remayu, Kec. Tuah Negeri		Kab. Musi Rawas	1	Dokumen	52.000.000
	- Pembangunan Sumur Bor di Desa Sumber Jaya, Kec. Belitang Jaya		Kab. OKU Timur	2	Titik	500.000.000
	- Pembangunan Sumur Bor di Desa Pujo Rahayu, Kec. Belitang		Kab. OKU Timur	2	Titik	500.000.000
	- Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di Desa Sumber Jaya, Kec. Belitang Jaya dan Desa Pujo Rahayu, Kec. Belitang		Kab. OKU Timur	1	Dokumen	105.000.000

7	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun**		**2**	**Dokumen**	**182.000.000**
	Alat Tulis Kantor					*1.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*16.000.000*
	- Survey Potensi Pembangunan Sumur Bor di Desa Remayu, Kec. Tuah Negeri		Kab. Musi Rawas	1	Dokumen	60.000.000
	- Survey Potensi Pembangunan Sumur Bor di Desa Sumber Jaya, Kec. Belitang Jaya dan Desa Pujo Rahayu, Kec. Belitang		Kab. OKU Timur	1	Dokumen	105.000.000
8	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun**		**1**	**Dokumen**	**367.000.000**
	Alat Tulis Kantor					*1.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*16.000.000*
	- SID Embung di Desa Panji Jaya, Kec. Peninjauan			1	Dokumen	350.000.000
9	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun**		**1**	**Dokumen**	**262.500.000**
	Alat Tulis Kantor					*500.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*12.000.000*
	- SID Sub. Kegiatan Normalisasi Sungai			1	Dokumen	250.000.000
10	**Pemeliharaan Sungai**	**Panjang sungai yang dipeliharra**		**12,6**	**KM**	**7.248.500.000**
	Alat Tulis Kantor					*16.500.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*32.000.000*
	- Pemeliharaan Sungai Aur		Kota Palembang	2000	Meter	150.000.000
	- Pemeliharaan Sungai Kedukan		Kota Palembang	3000	Meter	200.000.000
	- Pemeliharaan Sungai Propitan		Kota Palembang	2000	Meter	150.000.000
	- Pemeliharaan Sungai Solok Udang		Kota Palembang	2000	Meter	150.000.000
	- Pemeliharaan Sungai Durian		Kota Palembang	2000	Meter	150.000.000
	Pemeliharaan Sungai Buah IT.II		Kota Palembang	200	Meter	200.000.000

		Pemeliharaan Sungai Buah IT.III		Kota Palembang	200	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Duku		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Lingkungan RW.04 Kel. Sei Selayur		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Sukamulya		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Karya Mulia		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Lebung Gajah		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Sako		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Sei Selincah		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Bukit Sangkal		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Sukamaju		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Sialang		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kec. Plaju Ulu		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Sri Mulya		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kec. Kemuning		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Talang Kelapa		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Lingkungan RT. 03 RW.01 Kel. Alang-alang Lebar		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Lingkungan RW.10 Kel. Talang Kelapa		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Srijaya		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Talang Jambe		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kec. Gandus		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai Juaro		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000

		Pemeliharaan Sungai di Kel. Talang Bubuk		Kota Palembang	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Lingkungan RT. 15 Kel. Merah Mata		Kab. Banyuasin	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Merah Mata		Kab. Banyuasin	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Kel. Keramat Raya		Kab. Banyuasin	50	Meter	200.000.000
		Pemeliharaan Sungai di Lingkungan RT.26 Desa Sungai Pinang, Kec. Rambutan		Kab. Banyuasin	50	Meter	200.000.000
		Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya Air		Prov. Sumsel	1	Kegiatan	1.000.000.000
11	**Rehabilitasi Embung**		**Jumlah Embung yang Direhabilitasi**		**1**	**Unit**	**2.142.500.000**
	Alat Tulis Kantor						*2.500.000*
	Perjalanan Dinas Biasa						*40.000.000*
	-	Rehabilitasi Embung di Desa Panji Jaya, Kec. Peninjauan		Kab. OKU	1	Unit	2.000.000.000
	-	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Embung di Desa Panji Jaya, Kec. Peninjauan		Kab. OKU	1	Dokumen	100.000.000
12	**Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**		**1**	**Dokumen**	**3.700.767.570**
	Alat Tulis Kantor						*40.767.570*
	Perjalanan Dinas Biasa						*160.000.000*
	OP Pos Hidroklimatologi						*2.000.000.000*
	Pengadaan Alat Pemantau Air						*1.500.000.000*
B	**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Terlaksana**		**62,73**	**%**	**49.932.100.000**
1	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**		**Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi**		**5,8**	**KM**	**21.904.500.000**
	Alat Tulis Kantor						*19.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa						*297.000.000*
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Pius		Kab. OKU Selatan	850	Meter	3.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Sunur		Kab. OKU Selatan	850	Meter	3.000.000.000

	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Sungkai		Kab. OKU Selatan	1.100	Meter	4.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Megang Tikip		Kab. Musi Rawas	700	Meter	2.500.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Pasemah		Kota Pagaralam	560	Meter	2.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Satan		Kab. Musi Rawas	320	Meter	1.150.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Deras I		Kab. Musi Rawas	550	Meter	2.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Tebing Panjang		Kab. Lahat	520	Meter	2.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Manna I		Kab. Lahat	350	Meter	1.300.000.000
	-	Supervisi Kegiatan Irigasi		Prov. Sumsel	1	Dokumen	638.500.000
2	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa**		**Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi**		**104,5**	**KM**	**13.097.000.000**
	Alat Tulis Kantor						*9.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa						*88.000.000*
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bumi Agung		Kab. OKI	25.000	Meter	3.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sangkaji		Kab. OKI	19.000	Meter	2.300.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Lebak Datuk		Kab. OKU Timur	41.500	Meter	5.000.000.000
	-	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Tobong		Kab. OKU Timur	19.000	Meter	2.300.000.000
	-	Supervisi Kegiatan Irigasi Rawa		Prov. Sumsel	1	Dokumen	400.000.000
3	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**		**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara**		**16,3**	**KM**	**3.173.400.000**
	Alat Tulis Kantor						*3.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa						*60.000.000*
	Alat Tulis Kantor Rutin						*16.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa Rutin						*160.000.000*
	Belanja Bahan Lainnya						*160.000.000*
	-	Operasional Rutin DI Air Keban		Kab. Empat Lawang	1000	Meter	98.400.000

	-	Operasional Rutin DI Air Gohong		Kab. Lahat	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Manna I		Kab. Lahat	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Merendang		Kab. Lahat	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Tebing Panjang		Kab. Lahat	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Masam Balau		Kab. Lahat	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Pasemah		Kota Pagaralam	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Selangis Besar		Kota Pagaralam	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Deras I		Kab. Musi Rawas	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Satan		Kab. Musi Rawas	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Endikat Bengkok		Kab. Empat Lawang	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Megang Tikip		Kab. Musi Rawas	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Sunur		Kab. OKU Selatan	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Sungkai		Kab. OKU Selatan	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Air Pius		Kab. OKU Selatan	1000	Meter	98.400.000
	-	Operasional Rutin DI Ataran Sungai Air Deras/Cahaya Alam		Kab. Empat Lawang	1000	Meter	98.400.000
	-	Pemeliharaan DI. Selangis Besar		Kota Pagaralam	50	Meter	200.000.000
	-	Pemeliharaan DI. Air Gohong		Kab. Lahat	50	Meter	200.000.000
	-	Pemeliharaan DI. Masam Balau		Kab. Lahat	50	Meter	200.000.000
	-	Pemeliharaan DI. Air Merendang		Kab. Lahat	50	Meter	200.000.000
	-	Pemeliharaan DI. Ataran Sungai Air Deras/Cahaya Alam		Kab. Muara Enim	50	Meter	200.000.000
	-	Pemeliharaan DI. Air Keban		Kab. Empat Lawang	50	Meter	200.000.000

4	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa**	**Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara**		**3,2**	**KM**	**779.200.000**
	Alat Tulis Kantor					*1.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*20.000.000*
	Alat Tulis Kantor Rutin					*3.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa Rutin					*30.000.000*
	Belanja Bahan Lainnya					*30.000.000*
	- Operasional Rutin DIR Bumi Agung			1000	Meter	98.400.000
	- Operasional Rutin DIR Lebak Palas			1000	Meter	98.400.000
	- Operasional Rutin DIR Sangkaji			1000	Meter	98.400.000
	- Pemeliharaan DIR Lebak Semendawai			100	Meter	200.000.000
	- Pemeliharaan DIR Lebak Palas			100	Meter	200.000.000
5	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun**		**17**	**Dokumen**	**10.528.000.000**
	Alat Tulis Kantor					*17.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa					*136.000.000*
	- E-Faksi Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan		Prov. Sumsel	1	Dokumen	1.800.000.000
	- Dokumen Lingkungan DI. Muara Belida		Kab. Muara Enim	1	Dokumen	1.000.000.000
	- Dokumen Lingkungan DI. Arisan Muara Belida		Kab. Muara Enim	1	Dokumen	1.000.000.000
	- SID DIR. Rantau Panjang		Kab. Musi Banyuasin	1	Dokumen	480.000.000
	- SID DIR. Danau Cala		Kab. Musi Banyuasin	1	Dokumen	442.000.000
	- SID DIR. Buntiale		Kab. Musi Banyuasin	1	Dokumen	450.000.000
	- SID DIR. Doros		Kab. OKI	1	Dokumen	350.000.000
	- SID DIR. Pancur		Kab. OKI	1	Dokumen	612.000.000
	- SID DI. Tunggul Bute		Kab. Muara Enim	1	Dokumen	600.000.000

	-	SID DI. Air Gegas		Kab. Musi Rawas	1	Dokumen	575.000.000
	-	SID DI. Air Merah		Kota Pagaralam	1	Dokumen	375.000.000
	-	Review Design DIR. Bailangu		Kab. Musi Banyuasin	1	Dokumen	537.000.000
	-	Review Design DIR. Lumpatan		Kab. Musi Banyuasin	1	Dokumen	325.000.000
	-	Review Design DIR. Lebak Palas		Kab. Ogan Ilir	1	Dokumen	612.000.000
	-	Review Design DIR. Suka Pulih		Kab. OKI	1	Dokumen	437.000.000
	-	Review Design DIR. Ulak Jermun/ Jermal		Kab. OKI	1	Dokumen	262.000.000
	-	Review Design DI. Lecah Paye		Kab. Muara Enim	1	Dokumen	518.000.000
6	**Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi**		**Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi**		**1**	**Lembaga**	**450.000.000**
	Alat Tulis Kantor						*10.000.000*
	Belanja Bahan Suvenir						*15.000.000*
	Honorarium Narasumber						*30.000.000*
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						*100.000.000*
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						*90.000.000*
	Bimbingan Teknis						*90.000.000*
	Perjalanan Dinas Biasa						*90.000.000*
	Belanja Jasa Konsultansi						*15.000.000*
	Pakaian Dinas Lapangan						*10.000.000*

BAB. V
PENUTUP

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaan bersifat dinamis, mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan dan berdampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya Air (SDA) dan meningkatnya daya rusak air. Hal ini menuntut pengelolaan SDA yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan SDA tanpa dipengaruhi batas-batas administrasi yang dilaluinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Rencana Kerja SKPD Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen yang berpedoman pada Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2025 - 2030. Upaya untuk mencapai visi daerah Sumatera Selatan 2025-2029 yang dirumuskan sebagai **"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"** serta misi pembangunan daerah Sumatera Selatan terutama di bidang SDA haruslah dituangkan ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur serta diarahkan sesuai dengan sasaran dan terget yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada akhirnya, Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026;

b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra SKPD] tahun ketiga, mengenai target dan capaian indicator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] 2025 – 2030.

c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.